

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Afrinita. 2017. *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi pada pasal 18*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Lampung.
- Arwina, S. 2004. *Kepariwisata dalam Pembangunan Nasional dan Daerah*. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Davey. 1998. Kajian Teori Peran Dinas Pariwisata dan Pengembangan. <http://eprints.uny.ac.id/21664/4/4%20BAB%20II.pdf>. Online, diakses 29 april 2019.
- Hoessein, Bhenyamin. 2000. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*. Vol. 1 : No. 1.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Jamal, W. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisata*. Grasindo, Jakarta.
- Mafud, M. D. 2011. *Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- _____. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Pamuji, K., A. Azzis, Dkk. 2017. *Pengembangan Model Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa BanjarPanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas*. Pelaksanaan Penelitian Riset Institusi Unsoed Nomor : 2280/UN23.14/PN/2017, Purwokerto.
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Primadany, S. R., dan M. Riyanto. 2010. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 4.
- Rasjidi, L. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Jakarta.
- Riant, N. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Salah, W. 1996. *An Introduction of Tourism Theory*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Schmid, V. J. J. 1959. *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, .Terjemahan Wiratno dan Djamaludin Dt. Singomangkuto. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Sunardi, J. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta , Liberty.
- Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Universitas Negeri, Malang.
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi, Yogyakarta.
- Swarbrooke. 1996. *Pengembangan Pariwisata*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono. P. 1975. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indoneisa*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Yoeti. O. A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta, Kompas, Jakarta.
- Yustika, A. E. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Jakarta Selatan.
- Zainal, A., dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin, H. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Staf Kaur Pemerintahan Desa Pandak pada tanggal 24 April 2019

Hasil Wawancara dengan Ketua BPD Desa Pandak. Pada tanggal 7 Mei 2019.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretaris Jenderal MPR RI..

Siska Dewi Agustin, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Sinergisitas dengan Kepala Desa untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo*”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, Edisi 2013,

Termorshuizen, Marjanne. 2004. *The Concept Rule of Law*. “JENTERA Jurnal Hukum”. Edisi 3 Tahun II.